

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan data dan informasi untuk organisasi publik yang memberikan informasi keuangan kepada pihak terkait, mengkategorikan, menganalisis, dan mencatat atau membuat laporan keuangan, yang kemudian digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Dalam waktu singkat, akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya. Kinerja manajerial aparatur pemerintah di organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fokus perhatian publik saat ini. Untuk itu aparatur pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memiliki sifat profesional yang tinggi, produktif dan transparan. Oleh karena itu, seluruh pegawai, termasuk pimpinan instansi pemerintah, harus berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka pelaksanaan kewajiban pertanggungjawaban yang akan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dari tugas maupun fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi serta misi dan tujuan yang telah ditetapkan agar dapat diimplementasikan kepada masyarakat dalam bentuk anggaran. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran merupakan alat perencanaan yang salah satunya digunakan untuk menentukan indikator kinerja (Soleman, 2012).

Dengan demikian anggaran merupakan suatu cara menerjemahkan tujuan maupun strategi dari suatu organisasi kedalam terminologi operasional, serta mengungkapkan pernyataan jangka pendek dari suatu instansi sektor publik yang dinyatakan secara kuantitatif (Harun, 2009).

Anggaran partisipatif merupakan bentuk anggaran yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga yang terbawah untuk menyampaikan kebutuhan riil mereka kepada pemerintah sehingga mendapat perhatian khusus dalam alokasi anggaran, hal ini di gambarkan dengan adanya pembagian formulir dari pemerintah daerah setempat/Kecamatan kepada Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD) mengenai program prioritas dan program yang dibutuhkan beserta dengan rincian anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program tersebut (Sakti, 2017).

Hal inilah yang selanjutnya dapat diolah agar pembiayaan tersebut dapat memberikan efek langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga pada masa mendatang terjadi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses anggaran sangat menentukan kinerja pemerintah dan apabila proses penyusunan anggaran partisipatif ini berjalan dengan buruk, misal terjadi partisipatif semu dimana bawahan menciptakan senjangan anggaran karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi sehingga akan memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika penilaian prestasi pemimpin ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran, hal tersebut akan menurunkan kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan menetapkan sistem anggaran yang menggabungkan rencana kerja dan anggaran tahunan, terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Sardjito dan Muntaher, 2007). Perpaduan antara rencana kerja dan anggaran tahunan berimplikasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Rencana kerja anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengidentifikasi area masalah dalam organisasi dengan membandingkan hasil kinerja anggaran reguler, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2002).

Kinerja Manajerial merupakan hasil dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kerja dan pengetahuan profesionalnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor semangat kerjanya (Mangkunegara, 2005). Kinerja manajerial merupakan perpaduan antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari hasil, oleh karena itu kinerja manajerial tidak hanya berkaitan dengan karakteristik pribadi setiap pemimpin atau pegawai, tetapi juga berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dan akan diselesaikan seseorang .

Namun, kinerja tidak dapat hanya dilihat dari input atau perencanaan program saja tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, manfaat, dan outcome dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini anggaran dan kinerja manajerial menjadi perhatian yang penting, karena anggaran dan juga kinerja manajerial adalah pedoman kerja sehingga proses penyusunannya memerlukan perencanaan yang baik, metode yang tepat, serta sumber daya manusia yang baik pula sehingga anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran pemimpin dalam organisasi.

Faktor Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan adalah variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh penyusunan anggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial. Ketiga faktor tersebut menunjang partisipasi sebagai perilaku dan aktifitas dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga diasumsikan dapat mendorong kinerja manajerial dari suatu instansi pemerintah.

Komitmen Organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner, dalam Wulandari 2011). Komitmen organisasi digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pejabat pemerintah daerah mendukung organisasi tertentu dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Jika suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat, maka akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, komitmen organisasi yang tinggi juga dapat membuat individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi, dan selalu berusaha agar organisasi memenuhi harapan.

Budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai-nilai yang dibentuk dan diterapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi karakteristik atau perilaku dalam memimpin pegawainya agar dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan membimbing pegawai dalam mencapai tujuan organisasi (Umi, dkk, 2015). Selain itu pencapaian keberhasilan di dalam mengelola suatu organisasi tidak

terlepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dalam proses kepemimpinan, yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya melalui perilaku kepemimpinan seseorang. Gaya Kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan melalui perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain/bawahan agar bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam upaya mencapai tujuan tertentu (Hasibuan 2007 dalam Sakti 2017). Pegawai yang bekerja untuk gaya kepemimpinan tertentu, diharapkan bisa termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras karena menyukai dan menghargai pemimpin tersebut, mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi.

Fenomena yang terjadi terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyoroti minimnya tindakan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Untuk itu, Pemkot Metro diminta maksimal dalam tindakan terhadap anggaran yang tersedia dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat. Dari informasi yang dihimpun Kupastuntas.co, berdasarkan data laporan pencegahan dan atau penanganan Covid-19 Kota Metro yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota setempat menyebutkan bahwa total anggaran yang terealisasi hingga per tanggal 26 Juli 2021 dialokasikan mencapai 23,21 % yang telah terlaksana. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi bidang kesehatan dialokasikan sebesar 27,26 % anggaran yang terealisasi. Sementara untuk penanganan dampak/ dukungan ekonomi dan pendidikan dialokasi anggaran untuk itu baru terealisasi 7,61 %. Selain itu, bagi bantuan sosial safety net / jaringan pengamanan sosial dialokasikan anggaran yang baru terealisasi sebesar 6,64 %. Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki menyayangkan langkah Pemkot Metro dalam penggunaan anggaran. Minimnya tindakan untuk anggaran menjadi pertanyaan yang hingga kini diakuinya belum mendapatkan penjelasan. "Satu semester anggaran belum terealisasi 50 %, aturannya per akhir bulan Juli harusnya sudah 50 % lebih terealisasinya," kata Basuki saat dikonfirmasi. Jika anggaran penanganan Covid-19 untuk warga di

Kota Metro tak kunjung terealisasi, DPRD Kota setempat bakal menyurati Presiden Joko Widodo perihal lambannya kinerja Pemkot Metro. "Untuk melakukan koordinasi dan memimpin strukturalnya, Wali Kota sebagai kuasa pejabat pembina kepegawaian, kuasa pegawai dia. Kaitan dengan keuangan dia kuasa. Kuasa keuangan, kuasa anggaran. Jadi apapun yang dilakukan oleh OPD-OPD yang berkaitan dengan penyerapan di sinilah pembuktian kemampuan Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian," cetus pria yang akrab disapa Iloh tersebut. Ia menilai, persoalan minimnya tindakan anggaran Covid-19 merupakan tanggungjawab Kepala Daerah. Menurutnya, Walikota mampu memperkuat koordinasi dengan lintas OPD guna memaksimalkan tindakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. (kupastuntas.co. 2021)

Dari fenomena masalah tersebut peneliti mencoba mereplika penelitian sebelumnya oleh Sakti (2017), yang meneliti tentang "Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus OPD Kabupaten Sleman, Yogyakarta)" Penelitian ini telah dilaksanakan pada OPD Sleman, dengan responden penelitian pejabat struktural OPD Sleman dengan populasi 48 OPD. Sebagai perbedaan terhadap penelitian sebelumnya peneliti akan melakukan penelitian menggunakan populasi 13 OPD dan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel penelitian pejabat struktural OPD Kota Metro Provinsi Lampung yang terlibat dalam penyusunan anggaran seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, dll., dan memberikan pengaruh terhadap Kinerja Manajerial dengan menggunakan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul "***Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi***".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah kota Metro.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan beberapa masalah sebagai

berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial?
3. Apakah budaya organisasi memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial?
4. Apakah gaya kepemimpinan memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajerial.
2. Untuk membuktikan secara empiris komitmen organisasi memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial.
3. Untuk membuktikan secara empiris budaya organisasi memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial.
4. Untuk membuktikan secara empiris gaya kepemimpinan memoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif terhadap Kinerja Manajerial.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk penelitian- penelitian selanjutnya tentang Kinerja Manajerial.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang faktor - faktor yang mempengaruhi Kinerja Manajerial pemerintah daerah.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kinerja Manajerialnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti dalam mengimplementasikan apa yang peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.
- c. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca, menyediakan informasi terkait partisipatif anggaran dalam hubungannya dengan Kinerja Manajerial khususnya pada organisasi sektor publik.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan tercantum antara lain latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti/peneliti. Penelitian yang menggunakan analisis statistik, bab ini memuat kerangka pikir dan hipotesis (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi objek penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, pengukuran variabel dan metode analisis (metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dipakai dan metode analisis data).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan.